

PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2012-2017

(The Effect of Financial Inclusion on Income Inequality in Indonesia 2012-2017)

Afifah Siti Muslikhah¹, Efri Diah Utami²

Politeknik Statistika STIS¹

Politeknik Statistika STIS²

Jalan Otto Iskandardinata No.64C, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13330

E-mail: 15.8464@stis.ac.id

ABSTRAK

Masalah ketimpangan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu langkah pemerintah terkait keuangan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan yaitu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program inklusi keuangan. Dalam penelitian ini, inklusi keuangan diukur menggunakan suatu indeks berdasarkan penelitian Sarma (2012). Dalam kurun waktu 2012-2017, seluruh dimensi pembentuk indeks inklusi keuangan selalu meningkat, namun ketimpangan pendapatan di Indonesia fluktuatif meskipun cenderung menurun. Seharusnya dengan adanya peningkatan inklusi keuangan, angka ketimpangan dapat diturunkan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh inklusi keuangan dan variabel ekonomi makro lainnya terhadap ketimpangan pendapatan di 33 provinsi di Indonesia tahun 2012-2017 dengan menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sementara itu, variabel ekonomi makro yang memiliki pengaruh yang signifikan yaitu inflasi berpengaruh positif dan UMP riil berpengaruh negative, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan.

Kata kunci: inklusi keuangan, ketimpangan pendapatan, variabel ekonomi makro, Sarma

ABSTRACT

Inequality is one of the issues that still needs to be solved by the Indonesian government. One of the government's efforts regarding finance in reducing income inequality is to try to improve the prosperity of the society by creating a financial system that can be accessed by everyone to increase economic growth through financial inclusion programs. In this study, financial inclusion is measured using an index based on Sarma (2012). Over the period of 2012-2017, all dimensions forming the financial inclusion index have always increased, however Indonesia's income inequality has fluctuated even though it tends to decline. The increase of financial inclusion supposedly could decrease the level of inequality. Therefore the aim of this study is to analyze the effect of financial inclusion and other macroeconomic variables on income inequality in 33 provinces in Indonesia in 2012-2017 using the panel data regression method. The results showed that financial inclusion had a negative but not significant effect on income inequality in Indonesia. Macroeconomic variables that had significant effects were inflation with positive effect and the real UMP with the negative one, meanwhile the economic growth has a positive but not significant effect.

Keywords: *financial inclusion, income inequality, macroeconomic variables, Sarma*

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi di mana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak merata. Pengurangan ketimpangan menjadi salah satu target dari *Sustainable Development Goals* yang ditandatangani oleh 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan masih menjadi perhatian dan masalah besar yang dihadapi Indonesia. World Bank pada 2015 mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia paling tinggi di Asia Timur. Selain itu, survei lembaga keuangan Swiss yaitu Credit Suisse pada tahun 2016 menyatakan bahwa 1 persen penduduk di

Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Selain itu, temuan dalam Laporan Ketimpangan Indonesia oleh LSM Oxfam pada Februari 2017 menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketimpangan paling parah di dunia.

Salah satu langkah pemerintah Indonesia terkait keuangan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi yaitu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk beberapa program yang salah satunya adalah Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Pada bulan Juni 2012, Bank Indonesia bekerjasama dengan kantor wakil presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan Kementerian Keuangan mengeluarkan SNKI. Strategi tersebut sejalan dengan yang dilakukan Forum G20 dalam usaha menurunkan ketimpangan pendapatan (Bank Indonesia, 2014). Saat ini, strategi keuangan inklusif telah menjadi agenda penting di Indonesia. RPJMN 2015-2019 menyatakan bahwa salah satu sasaran penguatan sektor keuangan dalam lima tahun ke depan adalah meningkatkan akses keuangan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Kedepannya menurut Kementerian Keuangan (2017), keuangan yang inklusif berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pengurangan kesenjangan pendapatan.

Inklusi keuangan merupakan suatu kondisi yang memastikan adanya kemudahan akan penetrasi, ketersediaan, dan penggunaan terhadap seluruh layanan keuangan formal bagi seluruh anggota dalam suatu perekonomian. Pengukuran tingkat inklusivitas keuangan pada suatu perekonomian dapat dilihat melalui sebuah indeks yang dikembangkan oleh Sarma (2012). Indeks tersebut dinamakan *Index of Financial Inclusion* atau Indeks Inklusi Keuangan (IIK), yang mampu memberikan gambaran akan tingkat inklusivitas keuangan pada suatu perekonomian secara lebih komprehensif dibandingkan berbagai ukuran lainnya. Indeks tersebut dibangun dari tiga dimensi, yaitu dimensi penetrasi, dimensi ketersediaan layanan perbankan, dan dimensi penggunaan. Dimensi penetrasi yang dapat dilihat dari jumlah rekening deposit per 1.000 penduduk dewasa, dimensi ketersediaan layanan perbankan yang diidekatkan lewat jumlah kantor cabang perbankan dan jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa, serta proporsi volume kredit untuk sektor swasta dan proporsi deposit yang dimobilisasi dari sektor swasta terhadap total PDB merupakan representasi dari dimensi penggunaan.



Sumber: BPS, OJK, dan BI tahun 2012-2017, diolah

Gambar 1. Jumlah rekening deposit per 1.000 penduduk dewasa, Jumlah kantor cabang bank per 100.000 penduduk dewasa, Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa, Proporsi volume deposit dan kredit terhadap PDB, dan Koefisien gini di Indonesia tahun 2012-2017.

Pada gambar 1, terlihat bahwa seluruh dimensi pembentuk indeks inklusi keuangan hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2017. Selain itu, dalam publikasi laporan keuangan inklusif tahun 2017 disebutkan bahwa secara umum tingkat inklusi keuangan Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup berarti bahkan jika dibandingkan dalam konteks secara

global. Menurut data *Global Index Database*, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki rekening di bank pada tahun 2011 yang hanya sebesar 20 persen meningkat masing-masing menjadi 36,1 persen dan 48,9 persen pada tahun 2014 dan 2017. Peningkatan kepemilikan rekening di Indonesia tersebut tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Keadaan inklusi keuangan di Indonesia yang tercermin dalam tiap dimensi yang ada pada gambar 1, data *Global Index Database*, maupun publikasi laporan keuangan inklusif menunjukkan sektor keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin inklusif. Namun, dapat dilihat bahwa koefisien gini yang merupakan pendekatan pengukuran ketimpangan pendapatan di Indonesia, selama periode penelitian cenderung mengalami fluktuasi, bahkan cenderung stagnan.

Koefisien gini naik dari 0,410 pada 2012 menjadi 0,413 pada 2013 selanjutnya mengalami penurunan menjadi 0,406 pada 2014. Meskipun berangsur menurun menjadi 0,397 dan 0,393 pada 2016 dan 2017, namun sebelumnya telah terjadi kenaikan menjadi 0,398 pada tahun 2015. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, target pemerintah adalah menurunkan nilai koefisien gini menjadi 0,360 pada akhir tahun 2019. Melihat nilai koefisien gini yang masih berada pada angka 0,393 pada 2017 dan pergerakannya yang berfluktuasi, terdapat kemungkinan bahwa pemerintah tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Keadaan tersebut juga mengindikasikan bahwa dibutuhkan evaluasi usaha pengaruh inklusi keuangan yang telah diterapkan di Indonesia dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain pengaruh inklusi keuangan, penelitian ini juga melihat pengaruh variabel ekonomi makro lain yaitu, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan upah minimum provinsi riil (UMP riil) terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Variabel ekonomi makro tersebut merupakan variabel yang dianggap penting dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran ketimpangan pendapatan dan tingkat inklusi keuangan di Indonesia tahun 2012-2017, serta pengaruh dari inklusi keuangan dan variabel ekonomi makro lainnya terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan menggunakan analisis regresi data panel tahun 2012-2017.

METODE

Landasan Teori

Inklusi keuangan berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses dan menggunakan jasa keuangan (Sarma, 2012). Menurut Park, dkk (2015) yang mengaitkan inklusi keuangan dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan negara-negara berkembang di Asia menyatakan bahwa inklusivitas keuangan adalah salah satu strategi untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan dan sering dianggap sebagai alat yang efektif yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang lebih rendah. Penelitian tentang keuangan dan ketimpangan juga dilakukan oleh Beck, dkk (2007), Shahbaz dan Islam (2011), serta Ang (2010), hasilnya juga menunjukkan bahwa *financial development* membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Variabel ekonomi makro yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada kajian teori dan penelitian terkait. Pertumbuhan ekonomi memengaruhi ketimpangan pendapatan berdasarkan teori Kurva U-Terbalik Kuznets. Inflasi memiliki pengaruh terhadap ketimpangan melalui *equity effect* (Nopirin, 1992). Selain itu, banyak penelitian sebelumnya seperti Lee (1999), Bosch dan Manacorda (2010), Autor, dkk (2014), Lin Yun (2016), dan Blundell, dkk (2018) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara upah minimum regional maupun upah riil dan ketimpangan pendapatan, sehingga peneliti menggunakan variabel UMP riil.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan untuk menghitung Indeks Inklusi Keuangan (IIK) meliputi jumlah rekening DPK deposit per 1000 penduduk dewasa, jumlah kantor cabang per 100.000 penduduk dewasa, jumlah ATM

per 100.000 penduduk dewasa, serta rasio dari kredit dan deposit terhadap PDRB diperoleh dari OJK dan BI. Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan UMP riil diperoleh dari BPS. Penelitian ini mencakup 33 provinsi di Indonesia dengan periode waktu yang digunakan adalah tahun 2012 sampai 2017. Dalam penelitian ini, Provinsi Kalimantan Utara tidak disertakan karena sebagai provinsi pemekaran data yang dibutuhkan belum lengkap.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif pada penelitian ini disajikan menggunakan grafik dan peta tematik dengan tujuan untuk menggambarkan secara umum ketimpangan pendapatan, Indeks Inklusi Keuangan (IIK), pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan UMP riil di Indonesia tahun 2012-2017.

Penghitungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) menggunakan teknik pengukuran indeks yang dibangun oleh Sarma (2012) dan melibatkan tiga dimensi yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan layanan perbankan, dan penggunaan jasa perbankan. Dimensi penetrasi perbankan dalam penelitian ini menggunakan indikator jumlah rekening deposit per 1.000 penduduk dewasa, sedangkan dimensi ketersediaan layanan perbankan yang didekati lewat jumlah kantor cabang perbankan dan jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa. Sementara itu, dimensi penggunaan disusun berdasarkan indikator proporsi volume kredit untuk sektor swasta dan proporsi deposit yang dimobilisasi dari sektor swasta terhadap total PDRB. Sebelum menghitung indeks inklusi keuangan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung indeks untuk masing-masing dimensi dengan persamaan sebagai berikut:

$$d_i = w_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i} \quad ; i = 1, 2, 3 \quad (1)$$

dimana :

d_i : indeks untuk dimensi ke-i

w_i : bobot untuk dimensi ke-i

A_i : nilai sebenarnya untuk dimensi ke-i

m_i : nilai batas bawah untuk dimensi ke-i

M_i : nilai batas atas untuk dimensi ke-i

Persamaan (1) akan menghasilkan indeks dimensi yang bernilai $0 \leq d_i \leq w_i$ yang memiliki makna semakin tinggi nilai d_i maka semakin tinggi juga perolehan indeks dari dimensi i. Ketika tiga dimensi inklusi keuangan yang dipertimbangkan dalam penelitian ini, maka pencapaian suatu wilayah akan diwakili oleh titik $X = (d_1, d_2, d_3)$ pada ruang tiga dimensi. Dalam ruang tiga dimensi, titik $O = (0, 0, 0)$ mewakili titik yang menunjukkan kondisi di mana pencapaian inklusi keuangan yang paling rendah, sementara titik $W = (w_1, w_2, w_3)$ mewakili situasi ideal yang menunjukkan pencapaian tertinggi di semua dimensi.

Jarak titik X , O dan W harus diperhitungkan karena merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat inklusi keuangan suatu wilayah. Jarak yang lebih besar antara X dan O akan menunjukkan inklusi keuangan yang lebih tinggi dan jarak yang lebih kecil antara X dan W akan menunjukkan inklusi keuangan yang lebih tinggi. IIK didapatkan dari menghitung nilai X_1 (jarak antara X dan O) dan X_2 (jarak *invers* antara X dan W). Kedua jarak ini dinormalisasi oleh jarak antara O dan W untuk membuat nilai berada antara 0 dan 1, kemudian mengambil rata-rata sederhana X_1 dan X_2 . Rumus yang tepat diberikan di bawah ini :

$$X_1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}} \quad (2)$$

$$X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}} \quad (3)$$

$$IIK = \frac{1}{2} [X_1 + X_2] \quad (4)$$

Rumus (2) untuk X_1 menunjukkan jarak Euclidean yang dinormalisasikan antara observasi dan titik O . Normalisasi dilakukan untuk membuat nilai X_1 terletak antara 0 dan 1. Nilai X_1 yang lebih tinggi berarti suatu wilayah memiliki inklusi keuangan yang lebih tinggi. Rumus (3) untuk X_2 menunjukkan nilai invers jarak Euclidean yang dinormalisasi antara observasi dan titik W .

Normalisasi dilakukan untuk membuat nilai X_2 terletak antara 0 dan 1, sehingga nilai X_2 yang lebih tinggi menunjukkan inklusi keuangan yang lebih tinggi.

Rumus IIK (4) adalah rata-rata sederhana X_1 dan X_2 , sehingga menggabungkan jarak dari titik O dan titik W. IIK pada suatu waktu berada pada rentang nilai 0 sampai 1, di mana apabila IIK semakin mendekati nilai 1 maka bermakna bahwa suatu wilayah memiliki inklusi keuangan yang lebih tinggi dibanding pada waktu lainnya. Terdapat tiga kategori IIK yaitu nilai IIK kurang dari 0,3 sebagai IIK rendah, nilai IIK antara 0,3 sampai 0,6 termasuk dalam IIK menengah, dan nilai IIK antara 0,6 hingga 1 sebagai IIK tinggi.

Dalam penelitian ini, setiap dimensi akan memiliki nilai sesuai range atas masing masing pembobotannya, yaitu penetrasi perbankan ($0 < d_1 \leq 1$), ketersediaan layanan perbankan ($0 \leq d_2 \leq 0,5$), dan penggunaan jasa perbankan ($0 \leq d_3 \leq 0,5$). Namun, untuk dimensi ketersediaan layanan perbankan yang disusun dari dua indeks maka pembobotan yang digunakan adalah rata-rata tertimbang dari dua indeks yaitu $\frac{2}{3}$ bobot untuk indeks cabang bank dan $\frac{1}{3}$ bobot untuk indeks ATM. Selain menentukan bobot, untuk menghitung indeks setiap dimensi inklusi keuangan memerlukan batas atas dan batas bawah dari setiap indikator. Batas bawah (m_i) setiap dimensi dalam penelitian ini adalah 0. Sedangkan untuk menentukan batas atas (M_i) setiap indikator, ditentukan oleh nilai maksimum yang tergantung dari sebaran masing-masing indikator.

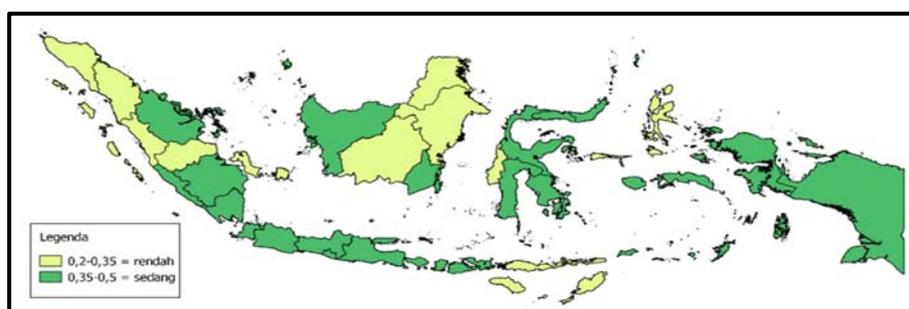
Analisis inferensia digunakan untuk melihat pengaruh inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan UMP riil terhadap ketimpangan pendapatan pada 33 provinsi di Indonesia tahun 2012-2017. Analisis inferensia yang digunakan adalah analisis data panel, yang melalui tahap pemilihan model terbaik, penetapan estimasi yang digunakan pada model terpilih melalui pengujian struktur varians kovarians residual, dan pengujian asumsi sesuai metode estimasi yang digunakan serta menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Ketimpangan Pendapatan dan Inklusi Keuangan di Indonesia

Ketimpangan Pendapatan

Rata rata koefisien gini Indonesia pada tahun 2012-2017 sebesar 0,404. Berdasarkan klasifikasi Todaro (2003) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia termasuk dalam kategori sedang. Namun jika dilihat ke level provinsi, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tidaklah sama. Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa seluruh provinsi di Pulau Papua dan Jawa mengalami ketimpangan pendapatan dalam kategori sedang. Di Papua adanya jarak yang besar antara penduduk modern atau yang bekerja di industri tambang sektor modern, seperti Freeport dan pemerintahan, dengan masyarakat tradisional. Sedangkan di bawahnya sangat tradisional sekali sehingga ada gap yang besar antara yang bekerja di pemerintahan dengan masyarakat awam.



Sumber : BPS tahun 2012-2017 (diolah)

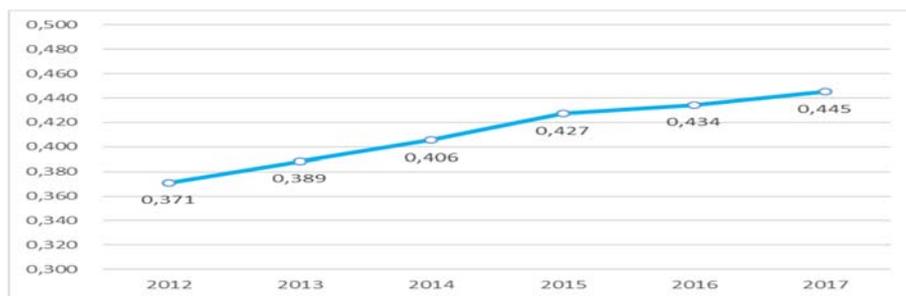
Gambar 2. Persebaran ketimpangan pendapatan 33 provinsi di Indonesia berdasarkan rata rata nilai koefisien gini tahun 2012-2017.

Sedangkan untuk Provinsi di Pulau Jawa nilai rata rata nilai koefisien ginya mencapai 0,402 diakibatkan karena terdapat beberapa kota besar, misalnya saja DKI Jakarta, yang menjadi pusat ekonomi negara, sehingga persentase lapisan masyarakat atas memang tinggi dalam hal

pendapatan dan pengeluaran. Paradigma pembangunan yang telah dijalankan Indonesia selama ini, di mana orientasi pembangunan di Indonesia selama ini masih berporos pada *urban oriented*. Dari kota-kota besar, kelas menengah atas tercipta dan masyarakat berdaya beli tinggi pun segera terintegrasi dengan masyarakat *consumer global*. Dari kelas menengah baru inilah pertumbuhan PDB dipacu menjadi sebuah pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi gaya hidup berbasis konsumsi sehingga lebih besar pula kesenjangan pengeluarannya dibandingkan dengan kelas menengah ke bawah.

Inklusi Keuangan

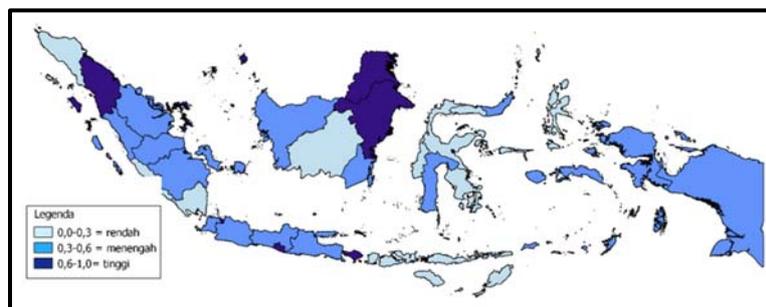
Gambar 4 menunjukkan terjadinya tren positif dari inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2017. Nilai IIK di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 0,371 dan meningkat menjadi 0,445 pada tahun 2017. Meskipun selalu mengalami peningkatan, namun tingkat inklusi keuangan Indonesia tergolong dalam tingkat inklusivitas menengah. Hal tersebut berdasarkan pada pengkategorian IIK menurut Sarma (2012), yaitu nilai IIK kurang dari 0,3 sebagai kategori rendah, nilai IIK antara 0,3 sampai 0,6 termasuk dalam kategori menengah, dan nilai IIK antara 0,6 hingga 1 sebagai kategori tinggi.



Sumber : OJK dan BPS tahun 2012-2017 (diolah)

Gambar 3. Nilai Indeks Inklusi Keuangan (IIK) di Indonesia tahun 2012-2017.

Nilai IIK di Indonesia jika dilihat ke level provinsi menyebar dalam kategori rendah, menengah, dan tinggi. Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa hanya terdapat 6 provinsi yang memiliki tingkat inklusi keuangan yang tinggi yaitu DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, DIY, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara. Sedangkan terdapat 16 provinsi dengan tingkat inklusivitas menengah yaitu provinsi Jawa Timur, Kep. Bangka Belitung, Banten, Papua Barat, Sulut, Sulsel, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Maluku, Jambi, dan Papua. Sementara provinsi dalam kategori inklusivitas rendah yaitu Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sulawesi Barat.



Sumber : OJK dan BPS tahun 2012-2017 (diolah)

Gambar 4. Persebaran inklusi keuangan 33 provinsi di Indonesia berdasarkan rata rata nilai IIK tahun 2012-2017.

DKI Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat inklusivitas tertinggi memiliki rata rata nilai IIK sebesar 0,979. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan ibukota provinsi Indonesia yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus perekonomian, sehingga inklusivitas keuangan di DKI Jakarta berkembang pesat. DKI Jakarta yang memiliki nilai penetrasi perbankan, ketersediaan

layanan perbankan, maupun penggunaan jasa perbankan paling tinggi, disebabkan oleh aktivitas perekonomian juga tinggi. Jakarta merupakan pusat kegiatan perekonomian Indonesia. Baik usaha skala kecil maupun usaha besar berskala industri berkembang di Jakarta. Menurut data BPS, jumlah UMK dan UMB di Provinsi Jakarta mencapai lebih dari 1,2 juta unit pada tahun 2017. Usaha ini membutuhkan modal untuk keberlangsungan usahanya. Salah satu sumber modal bagi UMK dan UMB adalah kredit yang ditawarkan oleh perbankan. Selain itu tingginya IIK di Jakarta disebabkan seluruh bank umum konvensional memiliki kantor cabang di Jakarta dan rata-rata jumlah kredit yang tersalurkan dan deposit yang terhimpun di Jakarta mencapai Rp4.000 triliun, serta kredit korporasi dicatat di kantor pusat yang terletak di Jakarta.

Sedangkan Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan tingkat inklusivitas terendah yang hanya memiliki rata-rata nilai IIK sebesar 0,153. Hal tersebut dikarenakan tiap dimensi pembentuk IIK di Sulawesi Barat yang masih rendah sehingga banyak penduduk yang tidak dapat mengakses perbankan. Menurut BI (2014) masyarakat yang tidak dapat mengakses perbankan di suatu wilayah karena adanya hambatan geografis yang mengakibatkan pendirian kantor cabang mahal. Selain itu, persyaratan yang ketat, proses yang kompleks, dan formalitas yang tinggi menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses jasa perbankan. Oleh sebab itu, selain perlu meningkatkan edukasi keuangan kepada masyarakat perlu juga menambah fasilitas dan kemudahan dalam proses dan persyaratan dalam penggunaan jasa perbankan.

Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan dan Variabel Ekonomi Makro Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Berdasarkan hasil dari tahapan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh model akhir yang diperoleh dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* dengan metode estimasi *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) atau *Seemingly Unrelated Regression* (SUR). Agar model yang diperoleh dapat memberikan estimasi yang *unbiased*, maka perlu dilakukan pengujian asumsi. Dalam penelitian ini model yang diperoleh memenuhi asumsi nonnormalitas dan non multikolinearitas. Berikut merupakan model estimasi data panel yang diperoleh :

$$\widehat{Gini}_{it} = (0,4112* + u_i) - 0,0420IIK_{it} + 0,0003PE_{it} + 0,0011Inflasi_{it}^* - 0,0221UMP_riil_{it}^* \quad (5)$$

*) signifikan pada tingkat signifikansi 5%

dimana :

- Gini_{it}* : Koefisien gini provinsi ke i periode ke-t (poin)
- IIK_{it}* : Indeks Inklusi Keuangan provinsi ke i periode ke-t (poin)
- PE_{it}* : Pertumbuhan Ekonomi provinsi ke i periode ke-t (persen)
- Inflasi_{it}* : Inflasi provinsi ke i periode ke-t (persen)
- UMP_riil_{it}* : Upah Minimum riil provinsi ke i periode ke-t (juta rupiah)

Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Persamaan (5) menunjukkan bahwa variabel Indeks Inklusi Keuangan (IIK) tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Berikut merupakan penjelasan dan informasi terkait hasil yang tidak signifikan tersebut :

• dimensi penetrasi atau kepemilikan rekening masyarakat miskin rendah

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Gabriella dan Goeltom (2013) yang menyatakan bahwa *financial development* di Indonesia belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal tersebut terjadi karena rendahnya akses keuangan dari masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Saat ini, perkembangan sektor keuangan hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke atas, sehingga ketimpangan masih tinggi, dan menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam hal kepemilikan rekening. Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki rekening pada tahun 2012-2017 menunjukkan keuangan inklusif yang semakin meluas di Indonesia, akan tetapi kesenjangan dalam hal kepemilikan rekening tetap masih besar. Menurut data Global Findex (2017) dari seluruh penduduk dewasa yang termasuk ke dalam 60% rumah tangga terkaya, 57% diantaranya memiliki rekening, sementara itu di antara penduduk dewasa yang termasuk kelompok 40% berpendapatan rendah, hanya terdapat 37%

penduduk dewasa berpendapatan rendah yang memiliki rekening. Padahal masyarakat berpendapatan rendah merupakan salah satu target utama dari adanya peningkatan inklusi keuangan, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaruh inklusi keuangan yang tidak signifikan dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan dikarenakan kurangnya manfaat pembangunan keuangan terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang sangat terkait dengan rendahnya akses mereka dalam memanfaatkan produk keuangan yang sudah ada.

- *dimensi ketersediaan di Indonesia terkonsentrasi di Jawa maupun daerah perkotaan, padahal penduduk miskin banyak di perdesaan*

Penyebab selanjutnya adalah dimensi ketersediaan di Indonesia mengenai layanan perbankan yang masih terbatas di perkotaan, sehingga inklusivitas keuangan belum secara maksimal dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Ang (2010) yang menyatakan bahwa pengembangan keuangan di India dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal tersebut karena semakin intensifnya distribusi cabang bank yang semakin menyeluruh yang diluncurkan oleh pemerintah India selama periode 1977-1990, sehingga dapat signifikan meningkatkan akses kaum miskin ke sektor keuangan formal. Sedangkan yang terjadi di Indonesia menurut data OJK (2017) menunjukkan bahwa persebaran ATM dan kantor cabang di Indonesia belum merata. Baik kantor cabang maupun ATM di Indonesia belum sepenuhnya dapat menyentuh ke pelosok karena sebesar 65% untuk ATM dan 51% kantor cabang masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Ditambah lagi dengan data BI (2014) menyatakan bahwa sekitar 52% penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan sekitar 60% tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal baik berupa kantor cabang maupun ATM. Padahal dari sekitar 12,49% penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64% tinggal di daerah perdesaan.

- *tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah*

Alasan selanjutnya adalah meskipun inklusi keuangan meningkat tiap tahunnya namun tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah, sehingga membuat masyarakat masih belum sepenuhnya paham terhadap layanan keuangan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Carpena, dkk (2011) menemukan bahwa literasi keuangan mempengaruhi kesadaran dan sikap seseorang terhadap produk keuangan dan penggunaan berbagai instrumen perencanaan keuangan yang tersedia. Menurut OJK (2017), menyatakan bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2016 masih rendah yaitu baru mencapai 29,66%, artinya dari setiap 100 penduduk hanya sekitar 30 orang yang termasuk kategori *well literate*. Padahal menurut data World Bank (2011) jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, seperti Malaysia yang mencapai 66%, Thailand 73%, dan Singapura 98%, maka tingkat literasi keuangan di Indonesia cukup rendah (detik, 2014). Dengan kondisi seperti ini, ditengarai masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana mengoptimalkan uang untuk kegiatan yang produktif. Di samping itu, masyarakat juga belum memahami dengan baik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal dan lebih tertarik pada tawaran-tawaran investasi lain yang berpotensi merugikan mereka. Oleh karena itu, produk dan layanan keuangan hanya dapat diakses oleh beberapa kalangan atas maupun masyarakat dengan kategori *well literate*, sehingga tingkat ketimpangan pendapatan belum sepenuhnya dapat ditekan.

- *bunga kredit perbankan di Indonesia tinggi*

Alasan terakhir adalah masih besarnya tingkat suku bunga kredit di Indonesia. Kurniadi (2017) menyatakan bahwa perubahan suku bunga kredit berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal tersebut karena kenaikan suku bunga kredit akan memicu peningkatan *cost of capital* yang merugikan pihak peminjam. Akibatnya preferensi masyarakat untuk meminjam dana ke bank, terutama yang berpendapatan rendah menjadi turun karena harus membayar bunga yang lebih tinggi. Selain itu, bunga kredit dan cicilan kredit bank yang besar, mengurangi kemampuan dan menjadi beban dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mencari pendanaan dari perbankan. Namun sayangnya, menurut data *World Bank* suku bunga bank di Indonesia saat ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di ASEAN. Negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand dan

Singapura di Tahun 2017 menetapkan besaran suku bunga kredit satu digit yang berada di kisaran 3% hingga 7%, sedangkan di Indonesia mencapai 11%. Tingginya tingkat bunga tersebut tentunya dapat semakin memberatkan pinjaman bagi pelaku bisnis kelas UMKM yang nyatanya mencapai lebih dari 60 juta unit atau lebih dari 99% dari total pelaku usaha.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Persamaan (5) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Meskipun tidak signifikan, terdapat informasi yang dapat dijelaskan terkait hasil tersebut. Menurut Shahbaz, dkk (2007) alasan dari pertumbuhan ekonomi belum dapat secara signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan adalah pembangunan ekonomi yang merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kalangan tertentu, yaitu penduduk berpendapatan menengah ke atas. Di Indonesia, kelas menengah merupakan penerima manfaat terbesar dari pengurangan kesenjangan pada tahun 2012-2017, sehingga mengakibatkan kelompok bawah kurang terhubung dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS (2018), selama tahun 2012-2017 kelompok kelas menengah di Indonesia memiliki rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita sebesar 0,83% dan merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita untuk kelompok bawah dan atas. Pada tahun 2012, kelompok menengah menyumbangkan distribusi pengeluaran per kapita sebesar 34,41% dan meningkat menjadi 36,47% di tahun 2017 yang berarti tumbuh hampir 6%. Sedangkan kelompok bawah hanya tumbuh kurang dari 1%, yaitu menyumbangkan distribusi pengeluaran per kapita sebesar 16,98% pada tahun 2012 dan hanya meningkat menjadi 17,12% di tahun 2017. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keuntungan dari peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya bukan dinikmati kelompok bawah, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin melebar.

Pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Persamaan (5) menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai slope sebesar 0,0011 menunjukkan bahwa ketika inflasi naik sebesar 1 persen akan juga meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,0011 poin dengan asumsi *ceteris paribus*. Ketika terjadi inflasi, kenaikan harga selalu mendahului kenaikan pendapatan. Dengan demikian, inflasi cenderung menimbulkan kemerosotan pendapatan riil sebagian tenaga kerja. Hal ini menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat yang akan semakin berkurang. Inflasi dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan di berbagai negara yang menunjukkan bahwa inflasi memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Temuan Albanesi (2002) yang merupakan profesor ekonomi dari *Columbia University* mendapati bahwa negara-negara dengan inflasi tinggi cenderung memiliki distribusi pendapatan yang timpang di 51 negara industri dan berkembang. Dengan inflasi yang tinggi mengakibatkan menurunnya daya beli sehingga mengakibatkan kelompok miskin menjadi semakin miskin.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi riil (UMP riil) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Persamaan (5) menunjukkan bahwa variabel UMP riil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai *slope* sebesar -0,0221 menunjukkan bahwa ketika perubahan UMP riil naik sebesar 1 juta rupiah maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,0221 poin dengan asumsi *ceteris paribus*. Sejalan dengan beberapa penelitian yang juga menemukan bahwa peningkatan upah minimum dapat juga meningkatkan pendapatan bagi jutaan pekerja berupah rendah, sehingga menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan. Penelitian Lee (1999), Bosch dan Manacorda (2010), serta Autor dkk, (2014) menunjukkan bahwa upah minimum yang menurun menyumbang sebagian besar pertumbuhan ketimpangan di Amerika Serikat dan Meksiko selama tiga dekade terakhir. Selain itu, Blundell, dkk (2018) menemukan bahwa penurunan upah riil terutama bagi mereka yang berpendidikan tinggi selama pasca resesi di UK mampu mengurangi pendapatan bersih dari kelas teratas di Inggris, sehingga mampu menekan ketimpangan pendapatan yang ada. Oleh sebab itu, UMP telah dianggap sebagai hal penting dari kebijakan publik dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

KESIMPULAN

Ketimpangan pendapatan di Indonesia termasuk dalam kategori sedang, sedangkan inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun indeks inklusi keuangan Indonesia tergolong dalam tingkat inklusivitas menengah. Dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sementara itu, variabel ekonomi makro yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia yaitu inflasi berpengaruh positif dan UMP riil berpengaruh negatif, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ang JB. (2010). *Finance and Inequality: The Case of India*. *Shouthern Economic Journal*. 76(3):738-761
- Albanesi, Stefania. (2002). *Inflation and Inequality*. *Centre for Economic Policy Research (CEPR) Discussion Paper No. 3470*. UK : London
- Autor, David H., Alan M, and Christopher L. Smith. (2014). *The Contribution of the Minimum Wage to U.S. Wage Inequality over Three Decades: A Reassessment*. *National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 16533*.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Perhitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2017*. Jakarta : BPS
- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: BI
- Bank Indonesia. (2017). *Laporan Perekonomian Indonesia 2017*. Jakarta : BI
- Beck, T., Ross, A. D., & Levine, R. (2007). *Finance, Inequality and The Poor*. *Journal of Economic Growth*, 12(March), 27–49.
- Blundell, Richard., Robert J., Agnes N. K., dan James P. Ziliak. (2018). *Income Inequality and The Labour Market in Britain and the US*. *Journal of Public Economics*, 162 h. 48–62
- Bosch, Mariano, and Marco Manacorda. (2010). *Minimum Wages and Earnings Inequality in Urban Mexico*. *American Economic Journal: Applied Economics* 2(4):128-49. doi: 10.2307/25760235
- Gabriella, L. G., dan Goeltom, M. S. (2013). *Pengaruh Pembangunan Keuangan Perbankan dan Akses Keuangan Perbankan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta : UI
- Carpena, F., Cole, S., Shapiro, J., & Zia, B. (2011). *Unpacking the Causal Chain of Financial Literacy*. *The World Bank : Policy Research Working Paper No. 5798*
- Kurniadi, Ravli. (2017). *Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia* [Skripsi]. Bogor : IPB
- Kementerian Keuangan. (2017). *Resep Atasi Ketimpangan Ekonomi*. *Media Keuangan* Volume XII(No115)
- Lee, David S. (1999). *Wage Inequality in the United States During the 1980s: Rising Dispersion or Falling Minimum Wage?*. *The Quarterly Journal of Economics* 114 (3):977-1023
- Lin, Carl & Yun, Myeong-Su, (2016). *The Effects of the Minimum Wage on Earnings Inequality: Evidence from China*. *IZA Discussion Papers* 9715
- Nopirin. (1992). *Ekonomi Moneter, Buku II, Edisi I*. Yogyakarta : BPFE
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Statistik Perbankan Indonesia Desember 2017*. Jakarta: OJK
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Srategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Revisit-2017*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Park, Cyn-Young and Mercado, Rogelio V. (2015). *Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia*. *Asian Development Bank Economics Working Paper*
- RI (Republik Indonesia). (2016). *Perpres No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sarma, Mandira. (2012). *Index of Financial Inclusion : A measure of financial sector inclusiveness*. *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development No.07/2012*.
- Shahbaz, M., Butt, S. M. dan Aamir, N. (2007). *Rural-Urban Income Inequality under Financial Development and Trade Openness in Pakistan: The Econometric Evidence*. *The Pakistan Development Review*, 46:657-672
- Shahbaz M, Islam F. (2011). *Financial Development and Income Inequality in Pakistan: An Application of ARDL Approach*. *Munich Personal RePEc Archive (MPRA)*. 17:13.
- Todaro, M. P. dan S.C. Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (8th ed), jilid 1*. *Diterjemahkan oleh Haris Munandar*. Jakarta: Erlangga.